

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah sebuah pergerakan awal suatu negara dan setiap warga negara berhak atas manfaat yang dihasilkan dan wajib ikut serta dalam proses mewujudkan cita-cita negara guna untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Tingkat kehidupan dikatakan rendah terjadi apabila secara langsung mempengaruhi kehidupan moral, tingkat kesehatan, dan tingkat kemiskinan (Ridwan & Sari, 2023). Akan tetapi, agar tujuan tersebut tercapai, langkah awal yang dilakukan adalah mengelola dan mengatur sistem ekonomi dengan bijaksana, dengan membuat keputusan dan wewenang yang tepat serta mengelola sumber daya secara efektif guna mewujudkan nilai ekonomi yang dapat dikatakan cukup baik yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu bagian dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga secara tidak langsung pembangunan ekonomi bertujuan untuk menurunkan tingkat kesenjangan masyarakat yang dapat dicapai dengan melalui tahap proses peningkatan kualitas hidup (Ridwan & Sari, 2023).

Pembangunan termasuk juga cara untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh kesatuan mulai dari masyarakat, bangsa, dan negara yang bertujuan agar mewujudkan cita-cita negara dalam pembukaan UUD 1945. Pemerintah telah membuat program untuk membantu dan mendorong pembangunan pedesaan. Tujuan pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dilaksanakan secara merata di Indonesia. Pembangunan desa juga

merupakan upaya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan inovasi baru demi terciptanya desa yang lebih baik dan memanfaatkan fasilitas yang di berikan pemerintah, sumber daya atau potensi lokal daerah dan kelompok masyarakat guna meningkatkan perekonomian desa secara berkelanjutan (Yudhistira & Emy, 2024).

Menurut Fitriska, dalam (Supardi & Budiwitjaksono, 2021) Desa merupakan wilayah terkecil dalam pemerintahan Indonesia yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Salah satu fokus pemerintah adalah mengembangkan wilayah desa yaitu melalui pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan dalam meningkatkan keberagaman dan produktivitas usaha di pedesaan. Hal ini dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana guna mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memanfaatkan sumber daya secara optimal sebagai fondasi ekonomi, serta memperkuat institusi yang mendukung proses produksi dan distribusi. Keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan pemerintah

Pembangunan pedesaan yang diatur dalam Undang Undang No. 6 tahun 2014 memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta mengatasi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan (Syarifudin & Astuti, 2020). Sesuai dengan peraturan pembangunan masyarakat di desa dalam UU No. 6 tahun 2014 yang merupakan cara yang dilakukan dengan prinsip berkelanjutan dan terencana untuk mewujudkan cita-cita masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari perubahan pemikiran dan perilaku masyarakat dari yang bersifat tradisional menjadi modern. Kewenangan desa dapat didukung

melalui strategi pembangunan yang harus dilakukan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya kompetensi sumber daya manusia (SDM), sedangkan di bidang ekonomi desa dilihat dari tingginya daya beli atau pola konsumsi masyarakat yang berakibat dari peningkatan pendapatan (Syarifudin & Astuti, 2020).

BUMDes dan BUMDesma merupakan bentuk lembaga ekonomi desa yang memiliki tujuan sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan usaha, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan dari segi pendanaan ataupun ruang lingkup wilayahnya. BUMDes merupakan badan usaha yang dibentuk dan dimiliki oleh satu desa yang didasarkan pada inisiatif pemerintah dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sedangkan BUMDesma merupakan bentuk dari kolaborasi antar desa yang memiliki tujuan yang sama dan modal nya berasal dari penyertaan modal dari desa anggotanya. Salah satu instrument untuk mewujudkan pembangunan desa dalam mensejahterakan masyarakat melalui beberapa programnya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran dengan membuka kesempatan untuk mendirikan suatu usaha (Siagian, 2014).

Adanya BUMDes dan BUMDesma ini tentunya harus didukung oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan perekonomian serta pendayagunaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 Pasal 3, BUMDes dan BUMDesma merupakan lembaga perekonomian desa berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini diatur secara mandiri, dengan sumber modal yang sebagian besar atau seluruhnya berasal dari kekayaan desa yang telah dipisahkan. Tujuan pembentukan BUMDes meliputi penguatan perekonomian desa, optimalisasi pemanfaatan aset

desa demi kesejahteraan masyarakat, pengelolaan potensi ekonomi desa melalui usaha masyarakat, serta pengembangan kerjasama usaha antar desa. Selain itu, BUMDes juga bertujuan menciptakan peluang usaha memperluas jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan layanan publik, mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Berdasarkan data (Kemendesa PDTT, 2024) perkembangan BUMDes dan BUMDesma tingkat nasional sebagai pembangunan daerah desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan sumber data yang diakses melalui Sistem Informasi Desa pada Kementerian Desa PDTT 2024, terdapat 54.815 BUM Desa dan 5.883 BUM Desa Bersama dan total keseluruhan BUM Desa secara nasional adalah 60.698 BUM Desa.

MENDAFTAR NAMA		PERBAIKAN NAMA		TERVERIFIKASI NAMA	
BUM Desa	BUM Desa Bersama	BUM Desa	BUM Desa Bersama	BUM Desa	BUM Desa Bersama
25	17	1.041	2.539	26.574	1.330

MENDAFTAR BADAN HUKUM		PERBAIKAN DOKUMEN		SUDAH BERBADAN HUKUM	
BUM Desa	BUM Desa Bersama	BUM Desa	BUM Desa Bersama	BUM Desa	BUM Desa Bersama
477	38	6.325	309	20.373	1.650

Gambar 1. 1 Jumlah BUMDes dan BUMDesma yang Mendaftar Nama Hingga Berbadan Hukum di Indonesia Tahun 2024

Sumber : Kemendes PDTT, 2024

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa terdapat 26.574 BUMDes yang terverifikasi nama dan 1.330 BUMDesma yang terverifikasi nama serta yang telah berbadan hukum terdapat sekitar 20.373 BUMDes dan 1.650 BUMDesma. Dapat dikatakan bahwa perkembangan BUMDes dan BUMDesma Bersama secara

signifikan meningkat (Kemendes PDTT, 2024). hal ini dapat dilihat dari jumlah desa di Indonesia yaitu desa – desa di Indonesia yang telah mempunyai BUMDes dan BUMDesma guna sebagai pengembangan perekonomian desa dan pengentasan kemiskinan diharapkan dengan adanya BUMDes serta BUMDesma ini dapat menyerap tenaga kerja di masing-masing wilayah sehingga mengatasi tingkat pengangguran.

Pembentukan BUMDesma yang inisiatif antar desa untuk mendirikan badan usaha kolektif dengan tujuan meningkatkan ekonomi lokal dan memanfaatkan potensi sumber daya secara optimal. Pembentukan BUMDesma biasanya melibatkan lebih dari satu desa yang saling bekerja sama untuk menciptakan unit usaha yang tidak hanya bermanfaat masyarakat akan tetapi juga menguntungkan. Proses pembentukan BUMDesma dimulai dengan adanya inisiatif dari beberapa desa yang ingin bekerja sama. Desa-desa yang memiliki potensi ekonomi yang sama, seperti pertanian, pariwisata, atau usaha mikro. Dalam pendiriannya juga harus melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk menyepakati pembentukan BUMDesma. Keputusan ini melibatkan masyarakat desa dan pemangku kepentingan lokal, termasuk kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

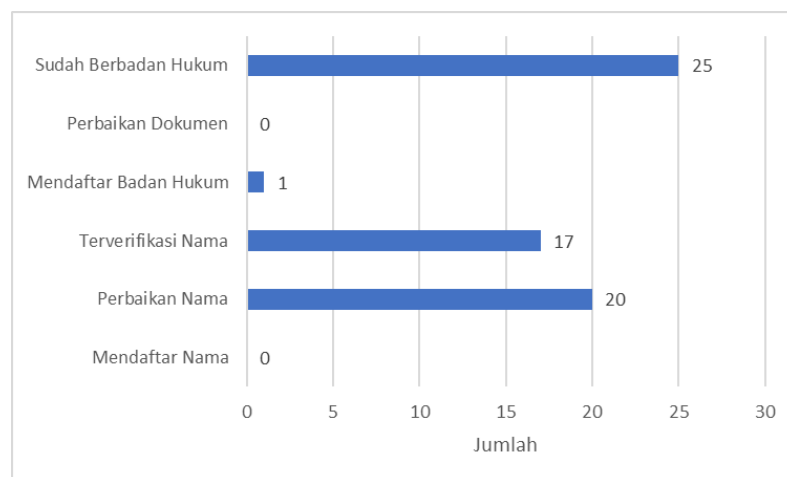
Perhatian utama dalam pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita. Sebelum adanya BUMDesma terdapat program yang bertujuan dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2007, setelah program PNPM berakhir pada tahun 2014. Pada tahun 2015 pengelolaan PNPM dialihkan oleh Kemendes PDTT menjadi Unit Pengelola Kegiatan (UPK

Eks PNPM MPd) dengan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) sebagai asetnya. Sehingga untuk melestarikan dan mengamankan aset UPK tersebut maka diterbitkanlah Permendes No. 15 Tahun 2021 tentang pembentukan BUMDesma sebagai peralihan dari UPK Eks PNPM.

Menurut Permendes No. 15 Tahun 2021 tentang pengelolaan BUMDesma yang merupakan transformasi dari UPK Eks PNPM MPd yaitu dilaksanakan dengan pengalihan aset, pengalihan kelembagaan, pengalihan personil, dan pengalihan kegiatan usaha. Pengalihan aset adalah pengalihan kekayaan berupa uang atau benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik aset tetap maupun aset bergerak yang sebelumnya dimanfaatkan oleh UPK Eks PNPM MPd, aset tersebut dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat desa pada BUMDesma yang telah di sepakati melalui Musyawarah Antar Desa (MAD). Pengalihan kelembagaan adalah pendirian BUMDesma sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) dengan menjadikan ketentuan standar operasional prosedur dan petunjuk teknis operasional UPK Eks PNPM MPd sebagai bagian dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDesma. Pengalihan personil merupakan pengalihan pengelola kegiatan UPK Eks PNPM MPd harus masuk pada kepengurusan organisasi BUMDesma dengan cara mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan praktik tata Kelola dan organisasi yang baik. Pengalihan kegiatan usaha yaitu pengalihan kegiatan usaha dari UPK Eks PNPM MPd dan kegiatan usaha lainnya yang telah dilaksanakan sebelum pembentukan UPK menjadi BUMDesma

Kondisi BUMDesma di Kabupaten Bojonegoro saat ini masih dalam proses perkembangan yaitu dapat dilihat dari data BUMDesma berdasarkan

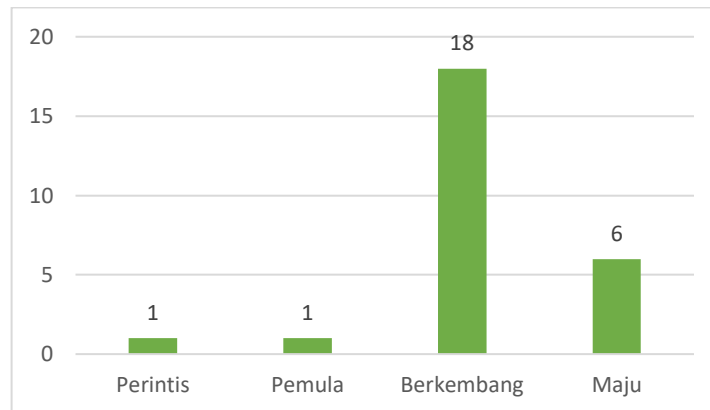
statusnya terlihat bahwa skor terbanyak yaitu ada pada BUMDesma yang berstatus badan hukum dan perbaikan nama. BUMDesma yang berstatus perbaikan nama berjumlah 20 BUMDesma, terverifikasi nama berjumlah 17, mendaftar badan hukum 1, dan yang telah berbadan hukum berjumlah 25 BUMDesma, seperti pada Gambar 1.2 berikut :



Gambar 1. 2 Status BUMDesma di Kabupaten Bojonegoro

Sumber : Kemendes PDDT, 2024

Berdasarkan hasil data pemeringkatan BUMDesma yang diperoleh dari DPMD Kab. Bojonegoro pada bulan September 2024. BUM Desa Bersama di Kabupaten Bojonegoro rata-rata masih dalam kategori berkembang, termasuk pula BUMDesama Jati Mulyo Temayang yang telah berstatus berbadan hukum, akan tetapi menurut pemeringkatanya masih tergolong dalam kategori berkembang seperti pada gambar 1.3 berikut :



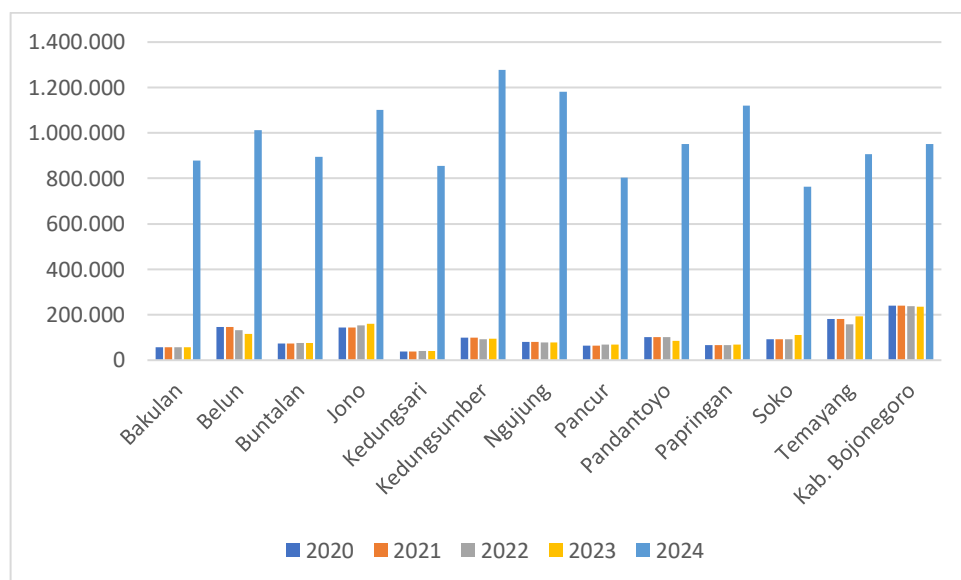
Gambar 1. 3 Pemeringkatan BUMDesma di Kabupaten Bojonegoro

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bojonegoro, 2024

Indikator pengukuran pemeringkatan BUMDesma yang diperoleh dari DPMD Kab. Bojonegoro dapat dinilai dari beberapa aspek menurut Permendesa No. 3 Tahun 2021 yaitu aspek kelembagaan, aspek unit usaha, aspek manajemen, aspek kemitraan/Kerjasama, aspek administrasi, aspek aset dan permodalan, serta aspek keuntungan dan manfaat bagi masyarakat. BUMDesma Jati Mulyo Temayang belum sepenuhnya memenuhi beberapa aspek tersebut sehingga perlu adanya peningkatan atau strategi dalam mengelola BUMDesma dengan memanfaatkan potensi lokal dengan baik agar dapat mewujudkan tercapainya pembangunan berkelanjutan. Menurut informasi dari DPMD Kab. Bojonegoro unit usaha yang dijalankan oleh BUMDesma Jati Mulyo Temayang ini adalah simpan pinjam, toko ATK. Kabupaten Bojonegoro secara geografis berada paling barat provinsi Jawa Timur di pedalaman Jawa. Secara geografis, Kabupaten Bojonegoro terletak di bagian paling barat Provinsi Jawa Timur di wilayah pedalaman Pulau Jawa. Kabupaten Bojonegoro memiliki kondisi geografis dan sumber daya alam yang cukup potensial, terutama di Kecamatan

Temayang. Potensi lokal di Kecamatan ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa setempat.

BUMDesma berperan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal secara terstruktur, dan berkelanjutan. BUMDesma, yang merupakan hasil kerja sama antar beberapa desa, bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki setiap desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan kemandirian desa. Adapun data Pendapatan Asli Desa (PADes) Kecamatan Temayang pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut :



Gambar 1. 4 PADes Kecamatan Temayang Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah)

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bojonegoro, 2024

Secara umum, Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kecamatan Temayang dari tahun 2020 hingga 2023 masih dibawah rata-rata PADes Kab. Bojonegoro dan mengalami peningkatan drastis di tahun 2024 terdapat beberapa desa yang

yang telah melebihi rata-rata PADes Kab. Bojonegoro, yang selaras dengan pendirian BUMDesma Jati Mulyo temayang ini yang didirikan pada Agustus 2022. Modal awal yang diperoleh BUMDesma ini berasal dari modal bersama desa-desa se Kecamatan Temayang dan modal bersama masyarakat desa sesuai yang tertuang dalam PP Nomor 11 Tahun 2021. Setiap Desa yang berjumlah 12 Desa di kecamatan Temayang memberikan modal awal sebesar Rp 5.000.000 dengan total modal dari desa sebesar Rp 60.000.000, adapun BUMDesma ini merupakan transformasi dari PNPM Mandiri, maka dana dari program PNPM mandiri disatukan dengan modal bersama dari desa-desa di Kecamatan Temayang yang disalurkan melalui rekening desa masing-masing ke rekening BUMDesma sehingga dapat digunakan untuk dengan pembagian PADes sebesar Rp 400.000 untuk setiap desa yang dihitung berdasarkan penyertaan modal dan dituangkan dalam AD/ART.

Tahap awal yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan wawancara singkat dengan Direktur BUMDesma Jati Mulyo Temayang yaitu Ibu Anik pada tanggal 17 Oktober 2024, dari hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa BUMDesma Jati Mulyo merupakan badan usaha yang didirikan melalui kerjasama antar desa-desa di Kecamatan Temayang yaitu sebanyak 12 Desa atau seluruh Desa di Kecamatan Temayang yang seluruh atau sebagian besar modal nya diperoleh dari APBDes Desa-Desa tersebut. Kecamatan Temayang ini juga memiliki potensi atau keunggulan sumber daya lokal antara lain sebagai pusat kerajinan atau sentra batik yang terdapat di dua desa di Kecamatan Temayang yaitu Desa Jono dan Desa Kedungsari, dan hasil dari BPS Kabupaten Bojonegoro, mayoritas penduduk kecamatan Temayang berprofesi sebagai petani dengan luas wilayah sekitar 70,02% yaitu seluas 8.727,01 ha merupakan

lahan pertanian dan 29,98% atau seluas 3.739,99 ha adalah lahan pemukiman penduduk, hasil dari pertanian tersebut masih dijual sebagai barang mentah, potensi sumber daya tersebut belum sepenuhnya dikelola atau dimanfaatkan atau dengan maksimal oleh BUMDesma, hal ini disebabkan oleh terbatasnya SDM yang ada untuk menggali potensi lokal sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal, sehingga dari keunggulan potensi yang dimiliki Kecamatan Temayang maka BUMDesma Jati Mulyo Temayang memiliki beberapa program untuk pemberdayaan ekonomi lokal diantaranya adalah simpan pinjam, toko ATK, pelatihan kewirausahaan, hibah peralatan usaha, bantuan sosial, hibah hewan ternak, penyewaan ruko, dan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Program Simpan pinjam ditujukan untuk masyarakat yang ingin mendirikan usaha baru ataupun yang telah memiliki usaha daaan perlu dikembangkan serta dapat diakses oleh pelaku UMKM tidak terkecuali oleh pengrajin batik yang ada di Kecamatan Temayang, simpan pinjam ini dapat menjangkau dengan mudah oleh masyarakat dikarenakan persyaratan yang diajukan sangat mudah sehingga tidak memberatkan masyarakat, sehingga dengan adanya simpan pinjam ini dapat membantu masyarakat dan mengembangkan usaha yang mereka miliki. Program BUMDesma selanjutnya adalah pelatihan kewirausahaan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam yang melimpah di wilayah setempat, dengan mengolah hasil pertanian seperti singkong menjadi produk bernilai tambah contohnya keripik singkong, keripik pisang, balungkuwuk dll, diharapkan masyarakat tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk mentah, tetapi mampu menciptakan produk olahan yang memiliki daya jual lebih tinggi di pasar. Melalui pelatihan ini, masyarakat dibekali keterampilan produksi sehingga

mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Selain dapat mengembangkan potensi di sektor pertanian program pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh BUMDesma Jati Mulyo Temayang memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan keunggulan lokal Kecamatan Temayang, yaitu kerajinan sentra batik. Melalui pelatihan kewirausahaan, masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan dalam mengelola usaha secara mandiri, tetapi juga mampu mengembangkan inovasi produk batik lokal agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi. Dengan demikian, program pelatihan kewirausahaan ini menjadi salah satu strategi konkret dalam memberdayakan pelaku usaha batik di Temayang, membuka peluang lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Program hibah peralatan usaha yang dijalankan BUMDesma Jati Mulyo Temayang merupakan salah satu bentuk dukungan nyata yang diberikan kepada masyarakat untuk mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi lokal. Bantuan ini berupa melainkan berupa peralatan penunjang usaha yang pernah diberikan gerobak serta peralatan lain yang sesuai dengan minat dari penerima bantuan. Program hibah ini bertujuan untuk mengurangi beban modal awal, meningkatkan produktivitas, serta menjamin kualitas produk yang dihasilkan sehingga memiliki daya saing di pasar. Selain itu, hibah peralatan usaha juga biasanya disertai dengan pelatihan kewirausahaan agar penerima mampu mengoperasikan peralatan dengan baik, dan mengelola usaha secara mandiri. Dengan demikian, hibah peralatan usaha diharapkan dapat membuka peluang usaha baru, menambah lapangan kerja. Program hibah peralatan usaha yang dilakukan oleh BUMDesma Jati Mulyo Temayang dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi lokal, khususnya pada sektor kerajinan sentra batik dan

pertanian. Pemberian hibah peralatan usaha seperti peralatan membatik, mesin jahit, maupun perlengkapan penunjang produksi dapat meningkatkan kapasitas para perajin batik dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing di pasar.

Program selanjutnya yang dijalankan BUMDesma Jati Mulyo Temayang adalah program bantuan sosial yang mencakup berbagai bentuk dukungan langsung kepada masyarakat, antara lain pemberian modal usaha untuk membantu pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya, penyaluran paket sembako bagi keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar, serta bantuan pembuatan jamban sehat guna meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan masyarakat. Melalui program bantuan sosial ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, ketimpangan ekonomi dapat ditekan, dan tujuan pembangunan desa yang lebih mandiri dan berdaya saing dapat tercapai.

Program bantuan sosial yang dijalankan oleh BUMDesma Jati Mulyo Temayang dapat disinergikan dengan potensi lokal Kecamatan Temayang berupa sentra batik dan sektor pertanian. Melalui skema bantuan sosial berupa modal usaha, peralatan kerja, maupun kebutuhan dasar produktif, masyarakat penerima manfaat dapat lebih mudah mengembangkan usaha batik maupun usaha pertanian yang ada di wilayah mereka. Pada sektor sentra batik, bantuan sosial dapat diberikan kepada para perajin dalam bentuk modal untuk membeli bahan baku, peralatan membatik, atau dukungan pemasaran sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Dengan demikian, sentra batik Temayang tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang sebagai identitas ekonomi lokal. Sementara di bidang pertanian, bantuan sosial dapat diarahkan

untuk mendukung petani dalam bentuk modal kerja, bibit unggul, pupuk, atau peralatan pertanian sederhana. Hal ini diharapkan dapat membantu para petani meningkatkan hasil panen dan menambah nilai jual produk pertanian melalui pengolahan lebih lanjut.

Pada hibah hewan ternak berupa kambing bertujuan memberdayakan masyarakat miskin produktif melalui sistem gotong royong. Satu ekor kambing dirawat bersama oleh dua orang agar pemeliharaannya lebih ringan. Jika kambing beranak, anaknya akan diberikan kepada pasangan penerima berikutnya, sehingga siklus bantuan terus berlanjut hingga semua penerima manfaat memperoleh giliran. Program hibah hewan ternak yang dijalankan oleh BUMDesma Jati Mulyo Temayang dapat diintegrasikan secara strategis dengan potensi unggulan Kecamatan Temayang, yaitu sentra batik dan sektor pertanian. Hibah hewan ternak, seperti kambing atau sapi, tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha peternakan, tetapi juga dapat mendukung rantai nilai di sektor pertanian dan kerajinan batik.

Pada sektor pertanian, keberadaan hewan ternak dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pupuk organik dari limbah ternak. Pupuk ini dapat digunakan oleh petani untuk memperbaiki kesuburan tanah, meningkatkan hasil panen, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Dengan demikian, usaha tani menjadi lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sementara itu, potensi sentra batik juga dapat mendapatkan manfaat secara tidak langsung. Limbah ternak yang diolah menjadi pupuk organik dapat digunakan untuk membudidayakan tanaman pewarna alami bagi industri batik, sehingga mendukung produksi batik ramah lingkungan dan berbasis bahan baku lokal. Selain itu, penguatan ekonomi

peternak akan menambah daya beli masyarakat, sehingga mendukung perputaran ekonomi lokal, termasuk sektor kerajinan batik.

Program BUMDesma selanjutnya adalah kerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan BUMDesma memiliki jaminan atas jaminan sosial berupa perlindungan, hal ini menjadi penting karena sebagian besar pelaku usaha di sentra batik maupun sektor pertanian bekerja secara mandiri dan informal, sehingga rawan terhadap risiko kerja dan belum memiliki jaminan sosial yang memadai. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, perajin batik akan merasa lebih aman dan termotivasi untuk terus berkarya, sementara petani dapat bekerja dengan tenang tanpa khawatir jika terjadi risiko kerja di lahan pertanian. Perlindungan ini menjadi penting karena sebagian besar pelaku usaha di sentra batik maupun sektor pertanian bekerja secara mandiri dan informal, sehingga rawan terhadap risiko kerja dan belum memiliki jaminan sosial yang memadai. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, perajin batik akan merasa lebih aman dan termotivasi untuk terus berkarya, sementara petani dapat bekerja dengan tenang tanpa khawatir jika terjadi risiko kerja di lahan pertanian.

BUMDesma juga memiliki usaha penyewaan ruko dan menjalin kemitraan dengan pihak ekspedisi JNT yang mana kerja sama ini tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi BUMDesma melalui pendapatan sewa, akan tetapi mempermudah masyarakat dalam mendistribusikan barang. Program penyewaan ruko yang dijalankan oleh BUMDesma Jati Mulyo Temayang dapat dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung pengembangan potensi unggulan Kecamatan Temayang, yaitu sentra batik dan sektor pertanian. Keberadaan ruko yang disewakan kepada pelaku usaha lokal dapat menjadi

pusat aktivitas pemasaran produk-produk batik maupun hasil pertanian setempat. Bagi para perajin batik, penyewaan ruko dapat dimanfaatkan sebagai tempat galeri batik, *workshop* membatik, sekaligus menjadi tempat penjualan. Dengan adanya tempat usaha yang strategis, produk batik Temayang dapat lebih mudah dikenal, menarik konsumen, dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Sementara di sektor pertanian, ruko juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penjualan hasil panen segar, produk olahan pertanian, atau pusat distribusi kebutuhan pertanian bagi petani lokal. Hal ini akan mendekatkan akses pasar antara petani dengan konsumen, meningkatkan nilai jual produk pertanian, serta mendukung berkembangnya ekonomi lokal berbasis potensi desa.

Dari beberapa program yang dijalankan BUMDesma Jati Mulyo Temayang, maka perlu ditentukan skala prioritas dalam upaya mengembangkan potensi lokal yang berperan sebagai pendukung kesejahteraan desa dan masyarakat. Penetapan prioritas ini akan membantu BUMDesma dalam mengelola potensi lokal desa secara lebih efektif dan efisien, sehingga pengembangan serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia dapat berjalan optimal. Dengan adanya prioritas, BUMDesma Jati Mulyo dapat lebih terfokus dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi lokal yang ada, sehingga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian desa. Selain itu, prioritas yang ditetapkan juga berperan dalam mengarahkan sumber daya, waktu, dan tenaga ke sektor yang memiliki peluang terbesar untuk dikembangkan, guna mencapai keberhasilan dalam pemanfaatan potensi lokal desa. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan sinergi serta keberlanjutan dalam pengembangan ekonomi desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian adalah **bagaimana strategi prioritas BUMDesma Jati Mulyo Temayang dalam pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di paparkan mengenai prioritas pengelolaan pada BUMDesa Bersama Jati Mulyo Temayang di Kabupaten Bojonegoro ini, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah **untuk mengetahui strategi prioritas BUMDesma Jati Mulyo Temayang dalam pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.**

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang pembangunan ekonomi khususnya ekonomi desa terkait strategi BUMDesma dalam pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

b) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis mengenai pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Kabupaten Bojonegoro.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberi manfaat pengetahuan bagi akademis serta dapat menjadi refrensi pada peneliti selanjutnya.

c. Bagi BUMDesa Bersama Jati Mulyo Temayang

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal BUMDesma di Kabupaten Bojonegoro agar lebih optimal.